



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

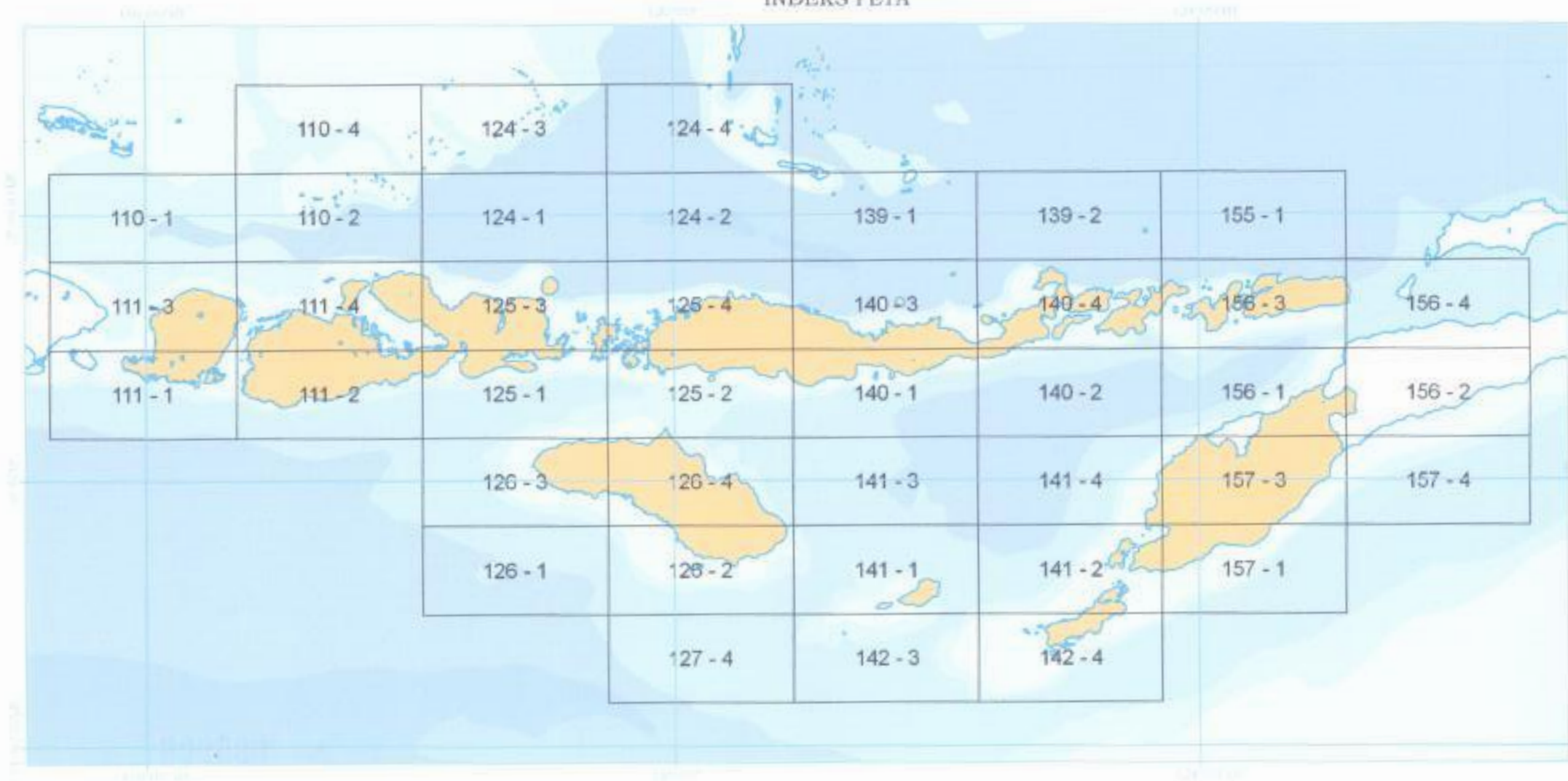
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KEPULAUAN NUSA TENGGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA



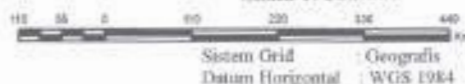


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRUKTUR RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000



ADMINISTRASI

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota Kecamatan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen (BLK), telah di ratifikasi
- BLK, perlu kesepakatan
- BLK, belum diratifikasi
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- ZEE Indonesia, belum diratifikasi
- ZEE Indonesia, perlu kesepakatan
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- BLT, perlu kesepakatan
- Sungai
- Garis Pantai
- Danau/Waduk

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Lintas Pulau
- Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan

Lintas Penyeberangan Antarpropinsi di Luar Nusa Tenggara

Lintas Penyeberangan Antarpropinsi di Kepulauan Nusa Tenggara

Lintas Penyeberangan dalam Propinsi

Lintas Penyeberangan Antar Negara

SISTEM JARINGAN ENERGI

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mimi Hidro (PLTM)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG)
- Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB)
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Jaringan Terestrial Antarkota








PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRUKTUR RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA KETERANGAN GAMBAR

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

-  Bendungan/Bendung
-  Wilayah Sungai

KEDALAMAN LAUT

-  0 - 500 m
-  500 - 1000 m
-  1000 - 3000 m
-  3000 - 5000 m
-  > 5000 m

SUMBER PETA:

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2000
- Peta Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia BIG, Tahun 2011
- Peta Batimetri Skala 1 : 1.000.000, Dinas Hidro-Oseonografi, TNI - AL, Tahun 2006
- Peta Jaringan Jalan, Kementerian Menteri PU No. 631/Kpts/M/2009 Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- Peta Jaringan Lintas Penyeberangan, Kementerian Perhubungan, Maret Tahun 2010
- Peta Wilayah Sungai di Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur skala 1: 4.800.000, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2012-2013 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2012-2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Tahun 2012

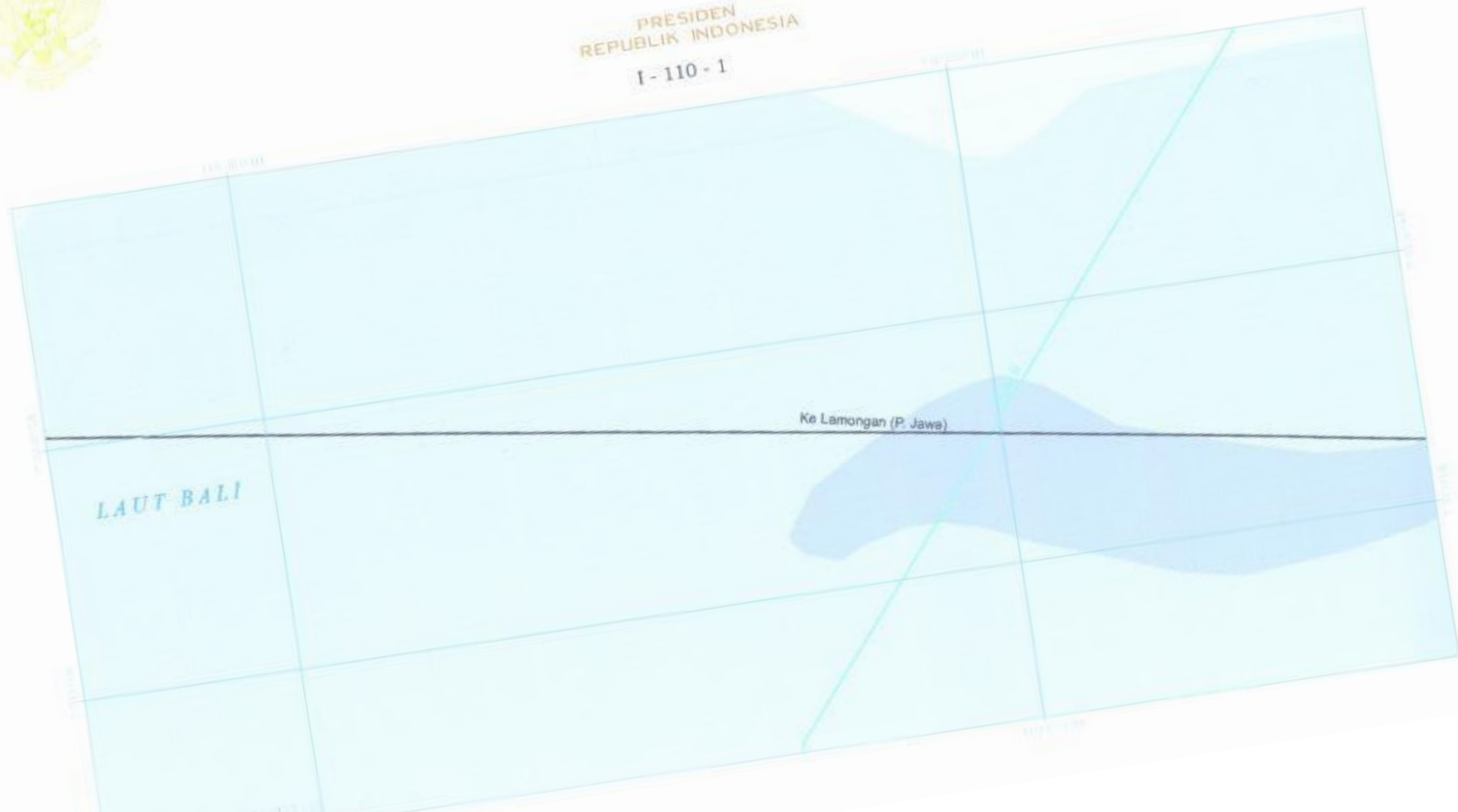
KETERANGAN PETA :

- Kedalaman informasi peta adalah 1:500.000
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Garis batas internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2011
- Hasil kajian Tim Teknis RTR Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

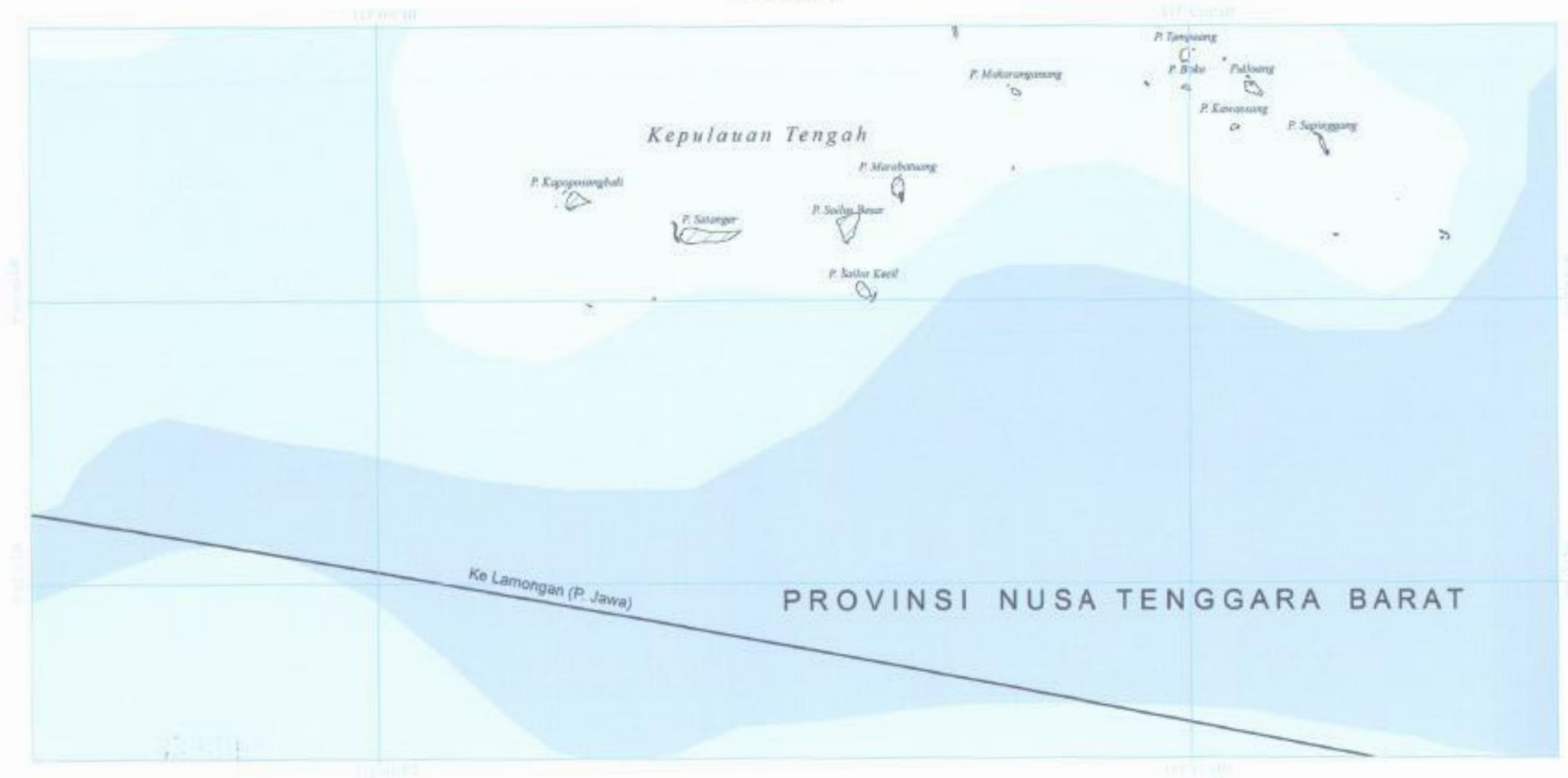
I-110-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 110 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 - 110 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 111 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

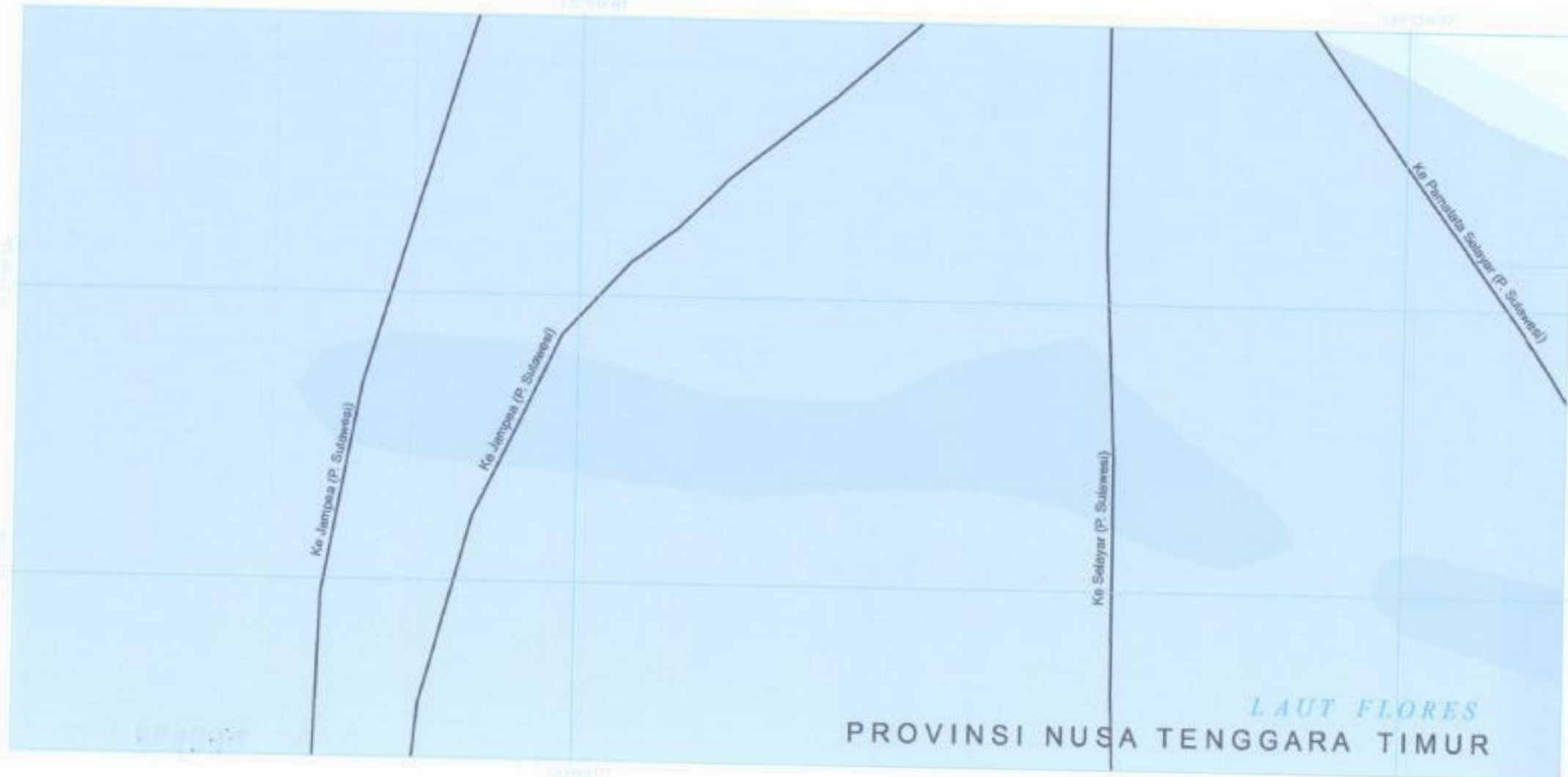
1 - 124 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 124 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 124 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 124 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 125 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 125 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

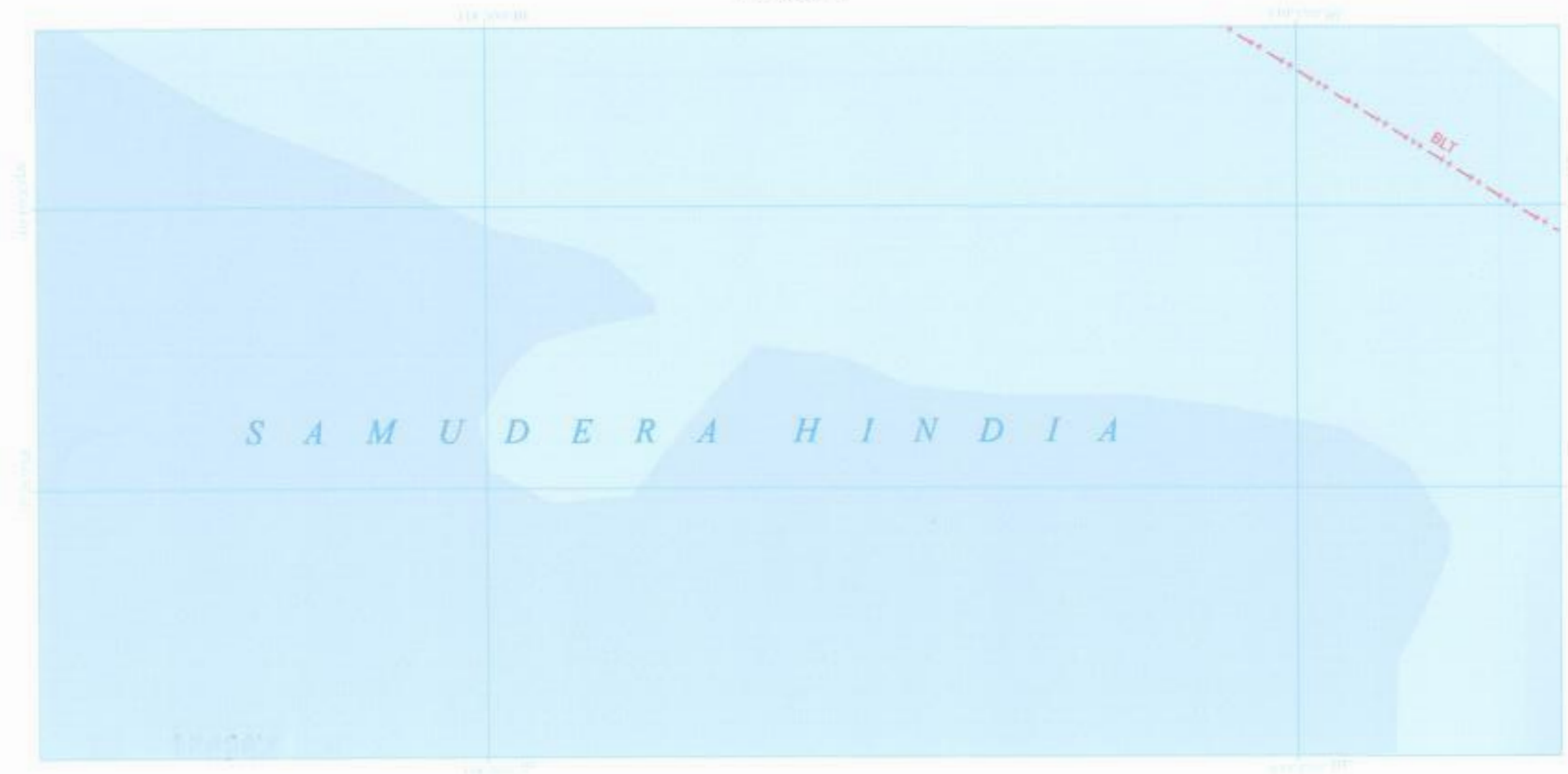
I - 125 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 126 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 126 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 126 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 127 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 139 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 139 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 140 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 140 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 - 140 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 140 - 4

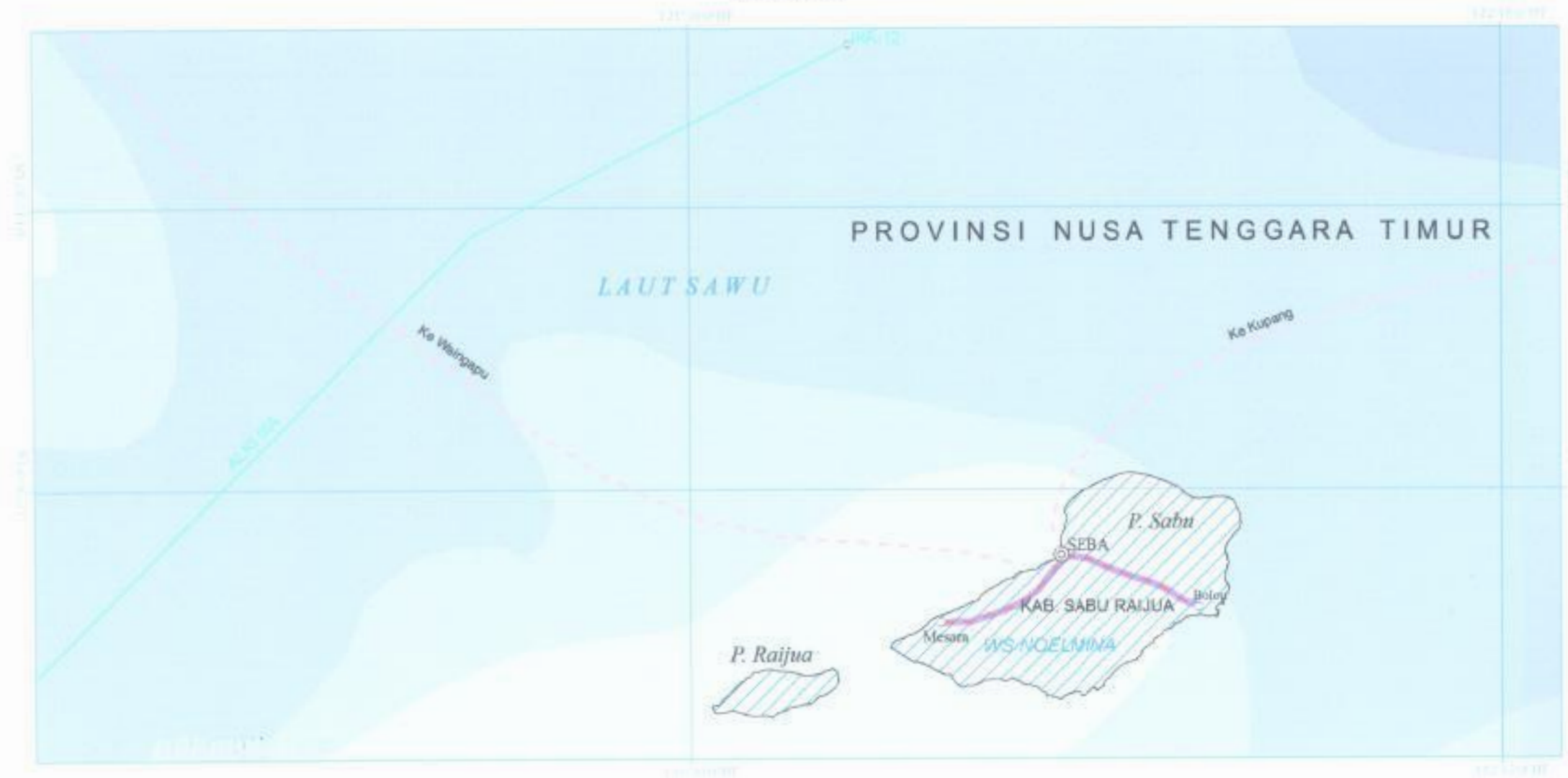
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

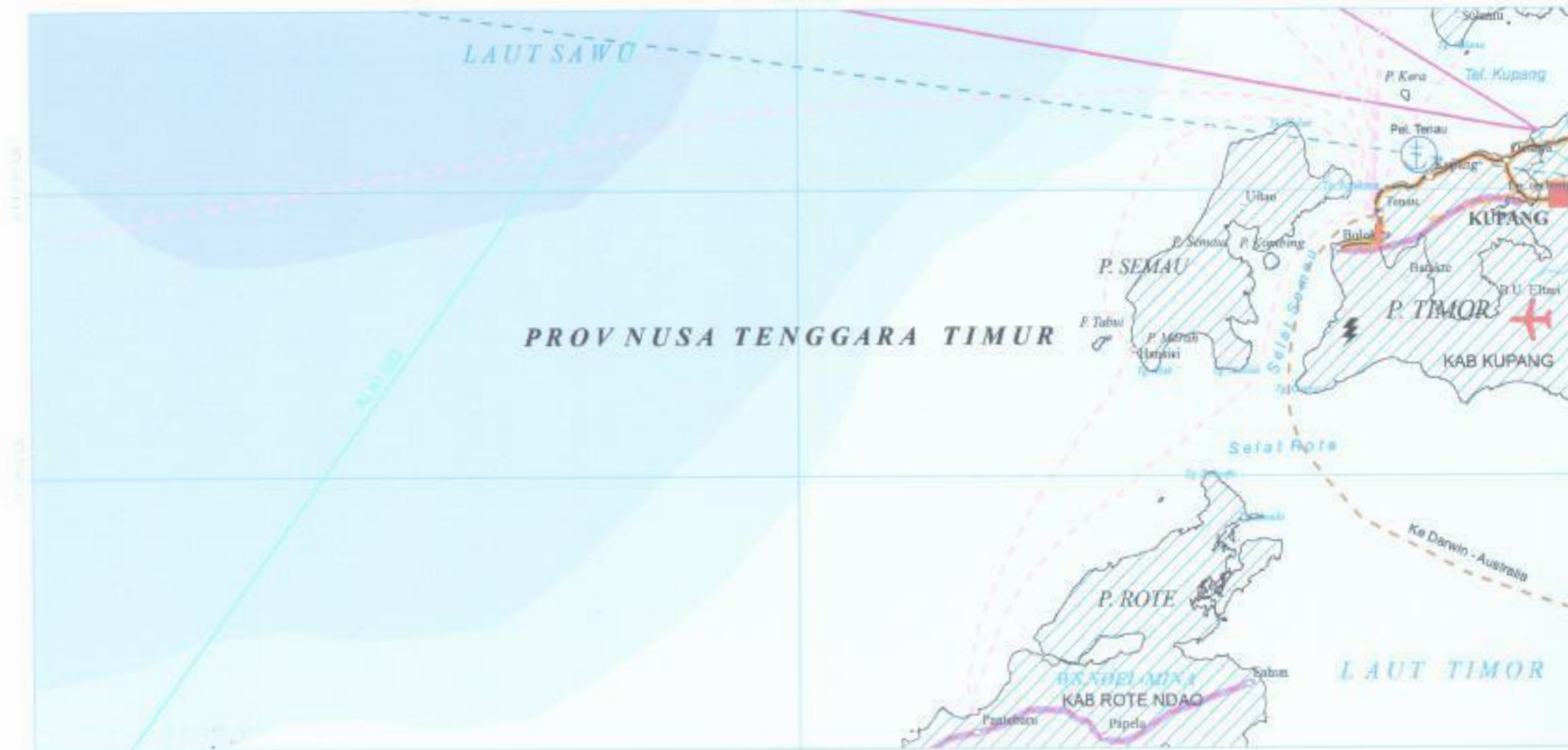
I - 141 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

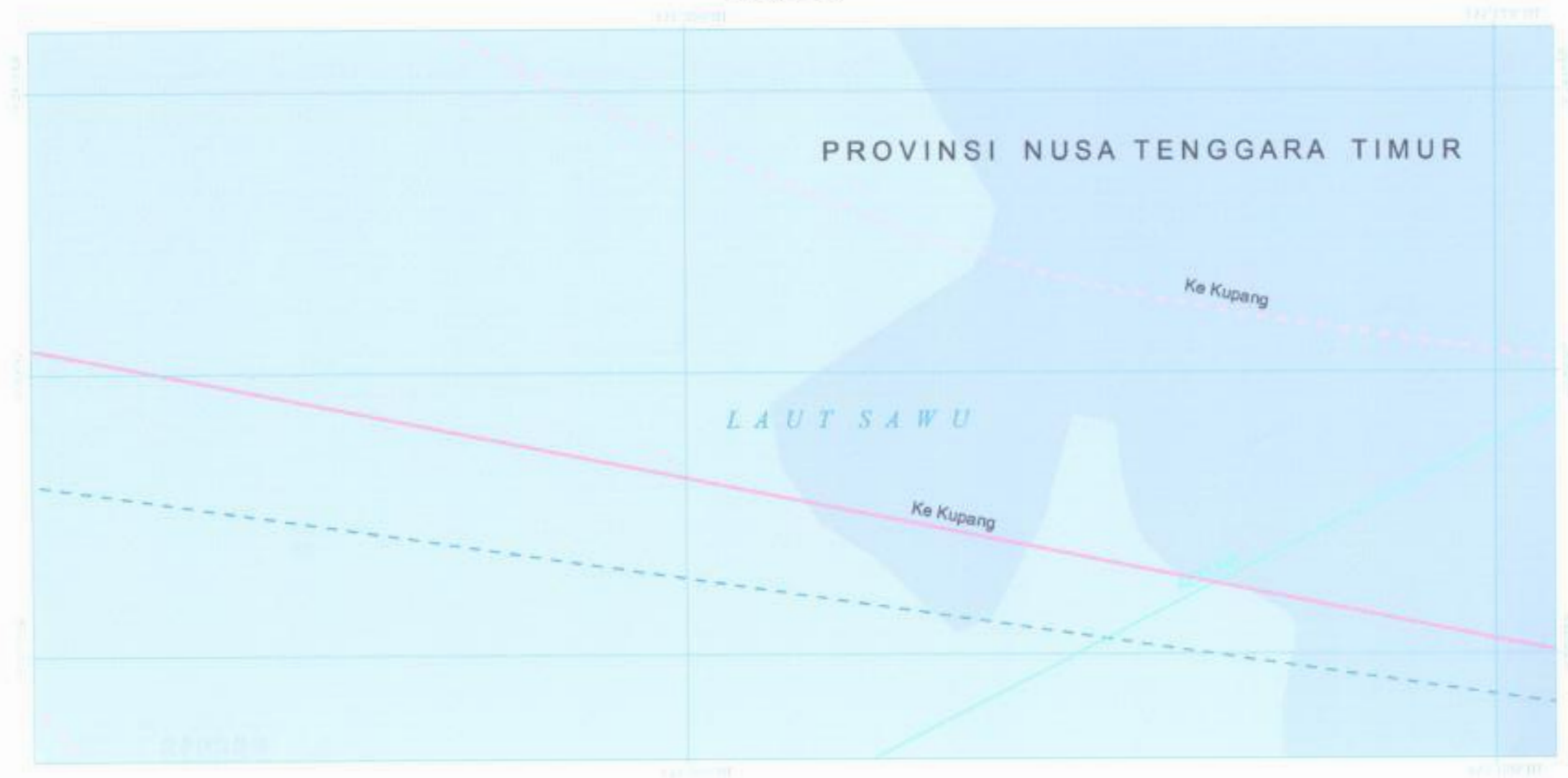
1 - 141 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 141 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 141 - 4

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAUT SAWU

ALU-ALU

P. Timor

KAB. KUPANG

Stasiun

MWS NOELMINA

1:250,000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 142 - 3

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

P. Dasa

BLT

ALUT

S A M U D E R A H I N D I A





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 142 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 155 - 1



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ke Iwaki (Kepulauan Maluku)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 156 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

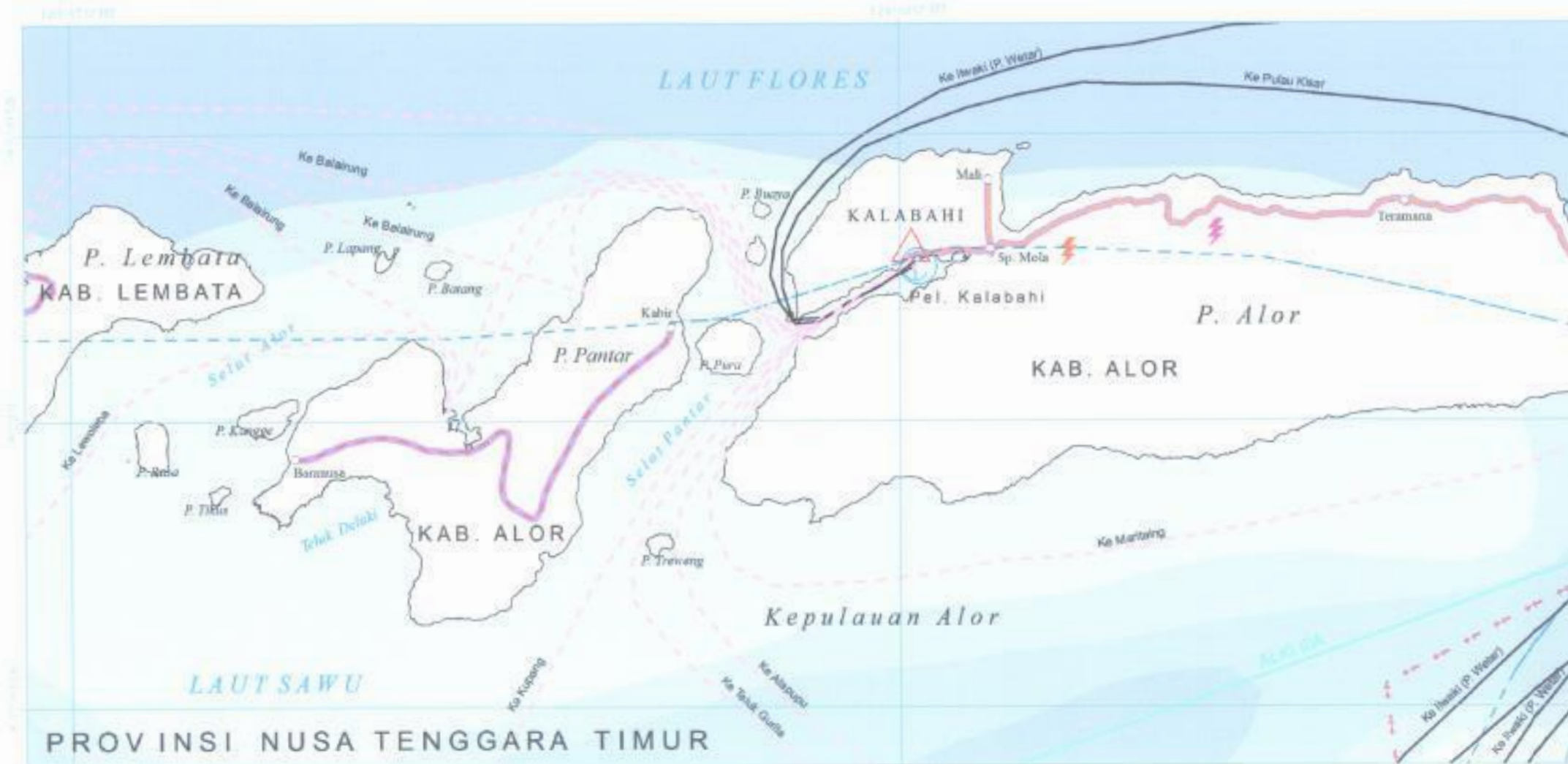
I - 156 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 156 - 3



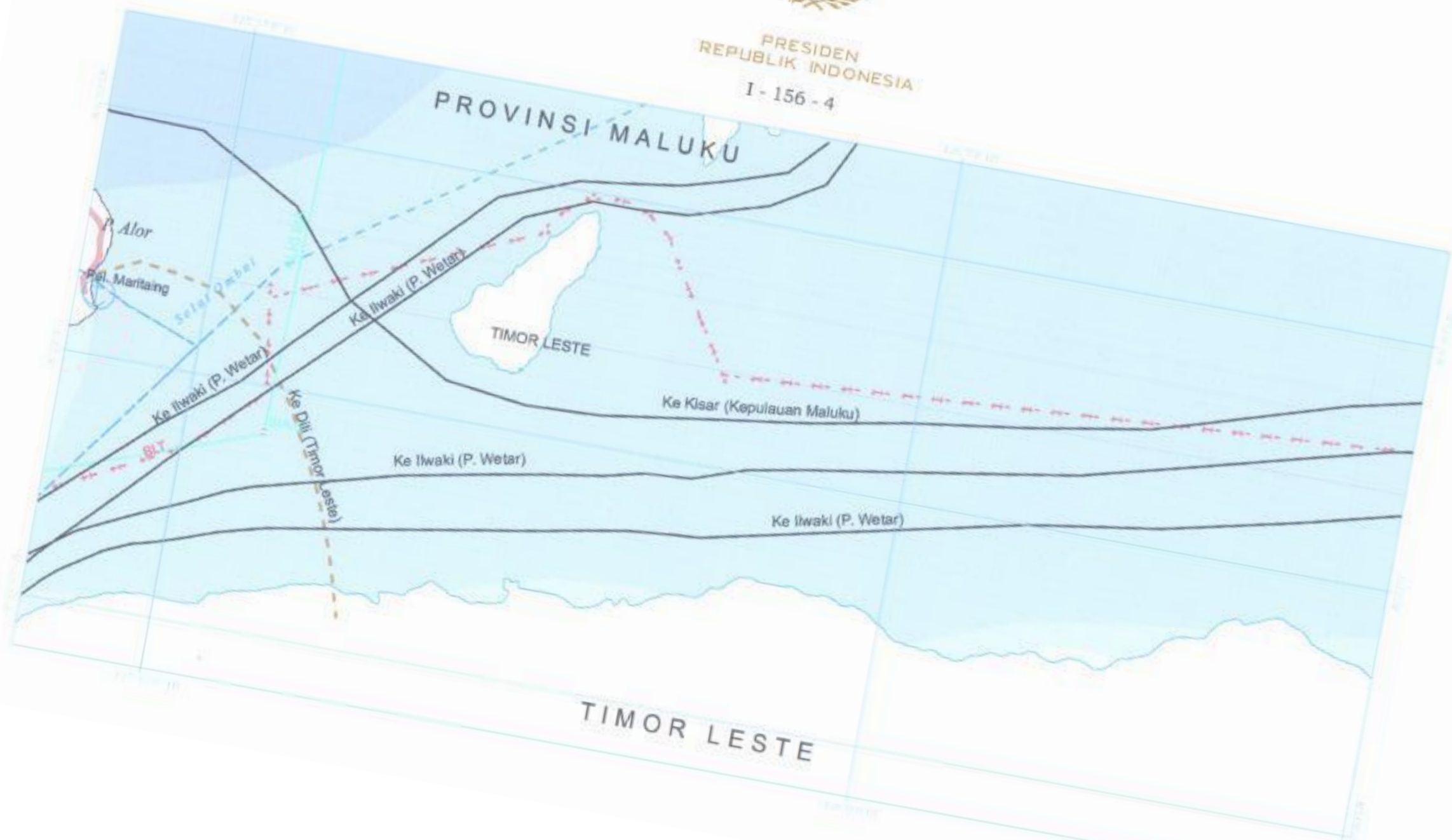


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 156 - 4

PROVINSI MALUKU

TIMOR LESTE

TIMOR LESTE





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 157 - 1





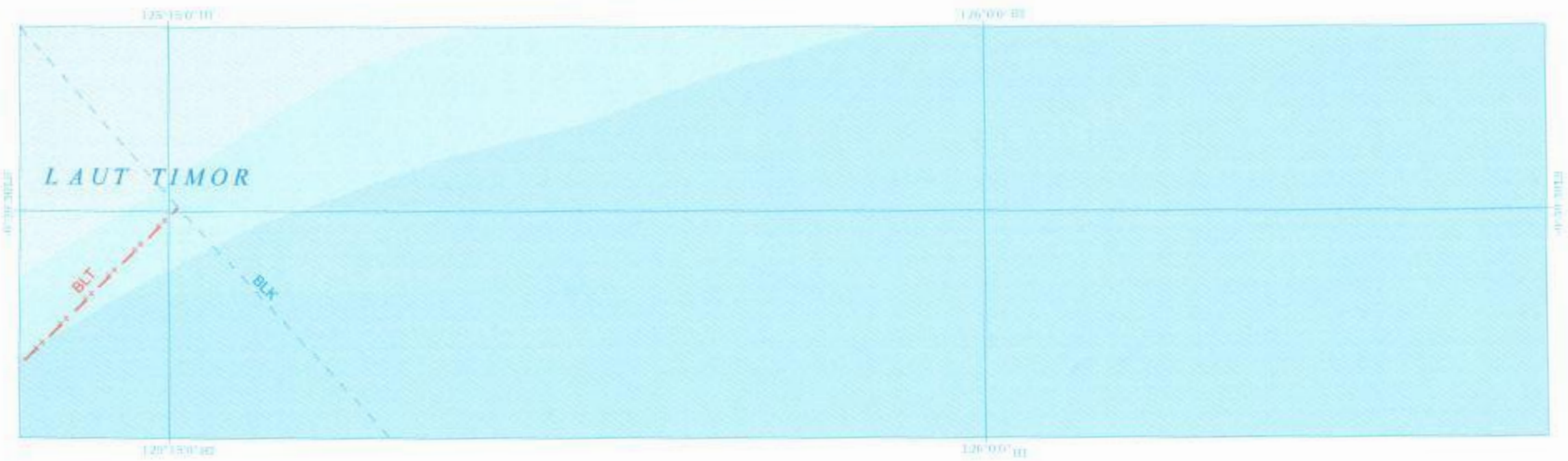
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 157 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1-157-4



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdianti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO